

KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI) PADA PEMBELAJARAN KEPRODIAN PPKN DAPAT MENINGKATKAN CIVIC SKILL MAHASISWA

Dwi Agustina Rahayu

Program Studi Pendidikan PKN, Universitas Bhinneka PGRI

Email: dwitinayu@gmail.com

Abstract

The achievement of qualifications produced by the educational system and the national job training system, namely human resources, is able to improve the quality and competitiveness of the Indonesian nation through the Educational Personnel Education Institute. As well as an assessment system for equality of learning outcomes. The research aims to determine the prospects and readiness of the Universitas Bhinneka PGRI in Tulungagung which is positioned as an educational institution for educational staff in the Pancasila and citizenship education study programe in improving students' civic skills. This research approach is qualitative with a descriptive method of research subjects, namely the Head of the study programe, lecturers and students. The data obtained is the result of observations, interviews and documentation carried out by researchers while conducting research in the field. The research results show that the implementation of a curriculum based on Educational Personnel Education Institutions in courses in the Pancasila and Citizenship Education study programe can improve the citizenship skills of Pancasila and Citizenship Education students.

Keywords : *Curriculum, Indonesian National Qualifications Framework, civic skills.*

PENDAHULUAN

Kurikulum pada hakekatnya adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan dengan meliputi komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu komponen: tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut harus dikembangkan agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya (Idi, 2014:14).

Pengembangan kurikulum sangat penting, karena akan menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang dapat mencapai kehidupan dan penghidupan yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Bobbit (1918), bahwa kurikulum harus dikembangkan dan disesuaikan dengan kecakapan-kecakapan yang harus dicapai.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35

ayat 2 dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Schubert (1986).

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan standar kompetensi guru yang ditetapkan. Selain itu secara konseptual dan empirik memerlukan penyesuaian tingkat kebijakan



yang akan dijadikan rujukan dalam menyusun berbagai program, termasuk pendidikan guru.

Kajian terhadap UU dan peraturan berkaitan dengan guru menghasilkan berbagai rumusan yang intinya menunjukkan urgensi dan perlunya terobosan untuk menerjemahkan ketentuan tersebut secara arif ke dalam kebijakan dan program revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan untuk mendorong tercapainya visi pendidikan Indonesia tahun 2045. Dalam mewujudkan profil lulusan guru perlu dirancang kurikulum yang menjamin ketercapaian kompetensi lulusan sesuai SN Dikti, untuk mencapai professional salah satunya dalam keterampilan Kewarganegaraan (*civic skills*).

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) adalah karakter yang dikembangkan secara psikopedagogis, andragogis dan sosiokultural dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Sumantri & Winataputra, 2017:4). Oleh sebab itu, kemampuan tenaga pengajar dalam mengembangkan kurikulum (*curriculum developer*) sangatlah dibutuhkan agar dapat menumbuhkan *civic skill* dalam diri para mahasiswa. Sebab, secara konsep untuk menjalankan peranan dan fungsi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) harus memiliki karakter, salah satunya adalah *civic skills* (Wahab & Sapriya, 2011: 31).

Hal penting yang hendak dikembangkan dalam mencapai tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu warga negara yang cerdas (memiliki pengetahuan kewarganegaraan), terampil (berpikir kritis dan berpartisipasi), dan berkarakter (loyal kepada bangsa dan negara, memiliki kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945). Pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan merupakan basis bagi terbentuknya karakter kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan berisikan sifat-sifat yang melekat pada diri setiap warga negara dalam melakukan perannya sebagai warga negara, hal ini akan terbentuk ketika pada dirinya telah terbentuk pengetahuan dan

keterampilan kewarganegaraan (Cholisin, 2004: 2).

Lembaga Pendidikan Tenaga membuat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan dan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Implementasi Kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang telah dilakukan, terus disempurnakan melalui revisi terhadap buku mulai dari buku I-V.. Selain itu, naskah akademik kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, juga dilengkapi dengan jenis-jenis panduan sebagai POB yang dapat dijadikan sebagai pedoman didalam mengimplementasikan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Bhinneka di Tulungagung.

Berdasarkan paparan di atas, maka dalam konteks penelitian ini, implementasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa akan diuji cobakan pada tingkatan program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Bhinneka di Tulungagung. Model kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai produk dari hasil penelitian ini, juga akan dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berupa: Kompetensi Inti dan kompetensi dasar, silabus dan rencana pembelajaran semester. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, dan bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Dalam Permenristekdikti 44/2015 ungkapan kunci yang digunakan adalah capaian pembelajaran lulusan.

Peraturan kementerian ristekdikti 44/2015 mengintegrasikan ke dalamnya dan memerincinya. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi dan program studi untuk mengubah kurikulum



mengikuti ketentuan aturan baru ini. Integrasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Perneristekdikti 44/2015 tampaknya membawa perubahan mendasar pada kurikulum perguruan tinggi. Hal itu tampak pada perubahan pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pengertian kurikulum tercantum pada Pasal 35.

Pembangunan karakter sikap keterampilan kewarganegaraan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan berbasis kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan suatu usaha yang tepat. Kerampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa terbangun pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ialah keterampilan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut meliputi cara berpikir kritis dan partisipasi sosial mahasiswa dalam menghadapi suatu permasalahan yang ada disekelilingnya. Dengan menerapkan karakter sikap keterampilan kewarganegaraan yang baik, mahasiswa akan memiliki sifat mandiri dan percaya diri yang dapat membantu mahasiswa dalam melangsungkan proses kehidupannya.

TEORI

Kurikulum

The term curriculum is broad and refers to the whole learning experience of students. For example, it can include a formal plan, global objectives, and the methods of educational delivery (Kevin B, 2011). Jadi kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibarat orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah „blue print“.

Definisi kerja kurikulum pada lembaga pendidikan merupakan suatu alat/usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan/sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan penting untuk

dicapai, maka dari itu harus adanya peninjauan tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut.

Peran Kurikulum

Kurikulum memiliki peran program pendidikan yang telah direncanakan sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan para siswa, sebagaimana yang diulaskan oleh Suryosubroto, yaitu: (a) Peranan konservatif: salah satu tanggung jawab kurikulum adalah menstransmisikan dan mentafsirkan warisan sosial. Dengan adanya peranan ini, maka sesungguhnya kurikulum itu berorientasi pada masa lampau; (b) Peranan kritis atau evaluatif: kurikulum turut aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Dengan demikian, kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu; (c) Peranan kreatif: mencipta dan menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan masa sekarang dan masa mendatang dalam masyarakat guna membantu tiap individu dalam mengemabangkan potensi yang ada.

Pengembangan Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Kaitannya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Ada beberapa hal yang mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan kurikulum; Pertama, adanya kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, akibat kemajuan tersebut banyak hal-hal baru yang ditemukan di dunia ilmu pengetahuan. Kedua, perubahan masyarakat (*social change*), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat ini menuntut juga terhadap perubahan kebutuhan dan orientasi masyarakat, dan ini berpengaruh juga bagi timbulnya perubahan kurikulum karena kurikulum itu sifatnya dinamis berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman. (Daulay, 2007: 94).

Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, dalam hal ini Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), merupakan



sebuah institusi pendidikan dalam konteks pendidikan profesi guru dalam rangka melakukan proses kelahiran bibit unggul yang profesional yang mumpuni dan berkompeten sebagai guru yang dapat digugu oleh siswanya. dalam konteks ini pengelola program studi atau jurusan sepatutnya melakukan penetapan konsep pencapaian mutu lulusan sebagaimana yang diinisiasikan dalam grand desain pada visi dan misi intitusi dimana konsep lulusan tersebut selanjutnya akan terwujud dalam bentuk profil lulusan.

Berkaitan dengan konteks ini ada dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan kualifikasi. Artinya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sangat penting untuk penyetaraan maupun penyandingan kualifikasi tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan.

Dengan demikian untuk menyingkapi fenomena yang mengindikasikan adanya keterkaitan secara signifikan antara pengembangan kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan (LPTK) dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diperlukan pedoman secara khusus berupa kebijakan pengembangan kurikulum itu sendiri.

Dengan adanya format yang demikian pengelola dapat merujuk tentang bagaimana merumuskan capaian pembelajaran untuk tingkat program studi biasa disebut dengan standar kompetensi lulusan serta tingkat perkuliahan sehingga nantinya adanya kekonsistenan dalam pencapaian visi dan misi pengembangan dan layanan pendidikan di Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan.

Hubungannya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa di setiap jenjang atau levelnya mengandung tiga capaian yang terintegrasi satu sama lain, diantaranya keterampilan (kognitif dan psikomotorik) yang dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan program perkuliahan;

pengetahuan (*content knowledge*) yang melandasi keterampilan yang dimiliki agar mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan global abad 21 dengan perubahan di masa mendatang; kemampuan manajerial bagi keterampilan dan pengetahuan yang dikuasai agar dapat berkembang sesuai dengan tuntutan profesionalnya.

KONSEP Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Landasan Yuridis

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sendiri merupakan kerangka acuan minimal yang menjadi ukuran, pengakuan penjenjangan pendidikan yang dilakukan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Disamping itu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia memiliki kedudukan formal yuridis dalam bentuk Peraturan Presiden, sebagai penjabaran dari peraturan-peraturan yuridis formal yang lebih tinggi yang tercakup di dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang - Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP No. 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, serta peraturan perundangan lain yang terkait dengan aspek-aspek mutu, sertifikasi, kualifikasi ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh kementerian atau lembaga berwenang lainnya.

Kemudian Prespektif Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, setiap program studi diharuskan memperjelas tentang "profil lulusan" yang diharapkan melalui kegiatan studi, studi kelayakan dan analisis kebutuhan di masyarakat. Profil lulusan mencerminkan kemampuan minimal yang harus dikuasai



mahasiswa setelah lulus yang merujuk pada empat aspek kebutuhan (1) sikap (*attitude*), (2) bidang kemampuan kerja, (3) pengetahuan, dan (4) manajerial dan tanggung jawab. Keempat kemampuan kemudian harus dijabarkan ke dalam sebuah capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada setiap mata kuliah di program studi. Sehingga nantinya, semua perencanaan pembelajaran atau Rencana Pelaksanaan Semester harus didasarkan pada capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) yang sesuai dengan kebutuhan profil lulusan.

2. Tujuan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bermuara pada profil lulusan. Bagaimana lulusan yang berkiprah di bidang keahlian tertentu selepas menyelesaikan studi. Harapannya, mereka memiliki kompetensi memadai. Ilmu dari dalam kampus dapat diterapkan dalam dunia kerja. Dengan demikian penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada lembaga pendidikan dimaksudkan sebagai pedoman untuk; (a) menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan; (b) menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan (c) menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan (d) mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia Tim (2014).

Selain itu implikasi yang diharapkan dari penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ini adalah; (1) meningkatnya kuantitas sumberdaya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional; (2) Meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal atau

pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional; (3) meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia; (4) meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.

Keterampilan Kewarganegaraan

Kecakapan kewarganegaraan atau (*civic skills*) merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang di peroleh menjadi suatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan di kaitkan dengan korelasi kemampuan kognitif dan hanya mengacu pada pengetahuan tentang politik dan institusi politik, keterampilan kewarganegaraan berkorelasi positif dengan kedua kecerdasan kemampuan kognitif (Maiello, Oser, & Biedermann,2003)

Komalasari dan Budimansyah (2008: 85) dalam kutipannya selaras dengan pendapat Banks yang membagikan kompetensi dalam beberapa kategori skill itu sendiri. *Civic Skills* merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan., agar pengetahuan yang diperoleh menjadi suatu yang bermakna, karena dapat memanfaatkan dalam menghadapi masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berperan serta secara efektif dalam masyarakat., berperan serta yang dirancang untuk memperkuat kesadaran berkemampuan dan berprestasi serta untuk mengembangkan pengertian tentang pentingnya peran serta aktif warga negara.



Menurut Setiawan (2014:38) keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalidjernih (2014:21) menyatakan bahwa istilah *Civic Skills* dalam pendidikan kewarganegaraan yang merujuk pada kemampuan – kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memahami, membandingkan, menjelaskan, mengevaluasi prinsip-prinsip, dan praktik-praktik pemerintah maupun kewarganegaraan.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sugiono (2017, hlm. 14) memberikan gagasan bahwa, "Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah". Lebih lanjut, Al Muchtar (2015, hlm. 128) mengemukakan bahwa, "Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, neopositivisme, neostrukturalisme dan postmodern digunakan untuk melakukan penelitian dengan tujuan menemukan kebenaran ilmiah, memperankan peneliti sebagai subjek melalui penafsiran realitas sebagai data empirik penelitian pada situs alamiah".

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian deskriptif analitik. Penelitian dilakukan pada Universitas Bhinneka PGRI di Tulungagung. Subjek penelitian adalah Kepala program studi di pada Universitas Bhinneka PGRI di Tulungagung, dosen dan mahasiswa pada Universitas Bhinneka PGRI di Tulungagung pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan menggunakan teknik triangulasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Bungin (2007, hlm. 68) menjelaskan bahwa, "Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi situasi, ataupun fenomena tertentu". Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan ciri khas suatu objek yang dapat dijelaskan melalui gambar ataupun kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan selama observasi, peneliti mendapatkan temuan dan hasil penelitian sebagai berikut. program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI sudah menerapkan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sejak tahun 2015. Identitas diri prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di di Universitas Bhinneka PGRI ialah menjadi Menjadi Program Studi yang menghasilkan pendidik Pendidikan Kewarganegaraan dengan berkearifan lokal dan pancasilais serta unggul dalam pemahaman perundang-undangan pendidikan pada tahun 2019. Fokus dari pada prodi ini mengarah akan mahasiswa paham dan menguasai undang-undang kependidikan sehingga lebih mengedepankan akan pengetahuan tentang ilmu hukum. Kontribusi yang diberikan dalam pembelajaran mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan implemnetasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam



meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa sangat besar. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan *civic skills* dan menjadikan mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting bukan hanya dalam kegiatan belajar di kelas, namun juga sebagai landasan pada kegiatan keterampilan di kampus.

Hasil keberhasilan dalam meningkatkan *civic skills* mahasiswa sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan di kampus Unit kegiatan Mahasiswa) dan juga berperan aktif dalam organisasi diluar kampus. Selain itu juga setiap Unit kegiatan Mahasiswa di kampus pasti ada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang ikut berperan aktif dan juga banyak yang menduduki jabatan ketua di Unit kegiatan Mahasiswa maupun presiden mahasiswa. Penelitian ini ditemukan bahwa pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa, karena dari berbagai sikap yang telaj diidentifikasi seperti; cinta kebenaran, berpikir kritis, anti korupsi, bertanggung jawab, komitmen moral, disiplin, percaya diri, sopan santun, proaktif, dan konsisten mahasiswa, dapat diketahui bahwa hanya perkembangan sikap disiplin dan kejujuran dalam pembelajaran yang sangat dirasakan oleh mahasiswa.

Hasil tersebut menunjukkan angka yang cukup baik meskipun belum sempurna. Kemudian dalam memaksimalkan pendidikan karakter sikap keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa, prodi juga membangunnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh setiap dosen dengan Rencana Pembelajaran Semester, selain itu adanya program diskusi dan studi lapangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hal ini yang dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI dengan implementasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dapat memaksimalkan pendidikan karakter sikap keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa.

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dilakukan dengan menetapkan capaian pembelajaran program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI. Rangkuman capaian pembelajaran untuk semua prodi yang dikembangkan dalam kurikulum berorientasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia disajikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1.1 Capaian Pembelajaran program studi PPKn

<p>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tulungagung mengarahkan mahasiswa untuk memiliki kompetensi utama yang meliputi berbagai aspek, antara lain adalah:</p> <p style="text-align: center;">a. Kemampuan Kerja</p> <p>1) Mampu menyusun rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran serta mengevaluasi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang berbasis pada teknologi informasi (IT);</p>
--



- 2) Mampu secara mandiri atau kelompok untuk melakukan tindak lanjut keputusan dalam pembelajaran pada peserta didik yang multi kemampuan, latar sosial dan budaya;
- 3) Mampu membina sikap, memberi keteladanan, keterampilan, dan mengembangkan potensi peserta didik yang berlandaskan Pancasila;
- 4) Mampu menggunakan media off atau on line dan mampu mengembangkan bahan ajar secara inovatif guna meningkatkan motivasi belajar dan memaksimalkan potensi peserta didik yang multi kemampuan, latar sosial dan budaya;
- 5) Mampu beradaptasi dengan situasi, implementasi, pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran yang relevan;
- 6) Mampu menyusun proposal dan laporan penelitian dengan baik sesuai kaidah ilmiah;
- 7) Terampil dalam bidang teknik penelusuran kepustakaan, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan teknik penulisan ilmiah; dan
- 8) Mampu dalam berwirausaha di bidang pendidikan dari hasil pengembangan media dan bahan ajar untuk peningkatan mutu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Kemampuan Pengetahuan

- 1) Menguasai teori dan konsep pedagogik, didaktik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta keilmuan lainnya yang mendukung tugas sebagai pendidik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memaksimalkan potensi peserta didik yang multi kemampuan, sosial dan budaya;
- 2) Membelajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik secara inovatif berbasis IPTEK berorientasi pada kecakapan hidup;
- 3) Mengembangkan alat penilaian untuk memperbaiki proses dan hasil belajar peserta didik yang membantu perkembangan potensinya;
- 4) Menguasai teknik perumusan masalah, metode penelitian, implementasi model dan teori serta melaksanakan kegiatan penelitian di bidang penelitian umum dan pendidikan;
- 5) Menguasai teknik penyusunan karya ilmiah yang dipublikasikan, berupa makalah, artikel dan jurnal;
- 6) Menguasai dasar-dasar wirausaha untuk membuat konsep POAC (Planning, Organizing, Actualing, dan Controlling) berbasis IT, untuk kesinambungan usaha dan daya saing; dan
- 7) Menguasai ilmu manajemen untuk mengembangkan usaha berbasis IT dan memiliki pengetahuan human relationship yang baik untuk membangun jaringan usaha dan relasi.

c. Sikap Khusus

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- 3) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- 6) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;



- 7) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- 8) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- 9) Menginternalisasi semangat kemandirian dan kejuangan serta kewirausahaan;
- 10) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.



Model pembelajaran dan Pendekatan dalam Kegiatan Belajar mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Penelitian yang dilakukan mengenai model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tepat untuk digunakan metode Pembelajaran ialah ceramah, diskusi, analisis Kasus. tanya jawab. Sedangkan untuk model pembelajaran; Pembelajaran Berbasis Masalah (*Problem Based Learning*), Project Belajar Kewarganegaraan (*Project Citizen*), Studi kasus (*Cased Study*), Tugas kelompok (*Syndicate Group*), Debat (*Controversial Issues*), Pembelajaran Kolaboratif (*Collaborative Learning*). Implementasi secara langsung dalam pembelajaran mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ada simulasi/praktek langsung seperti simulasi sidang tentang perkara pidana/perdata.

Pemilihan model pembelajaran dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mata kuliah di program studi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut didorong oleh konteks mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang cenderung membahas konteks sosial, sehingga perlu adanya keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dalam berpikir kritis dan berpatisipasi dalam menanggapi suatu permasalahan, dan harapannya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menjadikan contoh yang baik atau menjadi kepribadian yang baik dalam bewarga negara (*good citizhen*).

Kontribusi dan Hasil meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa melalui Pembelajaran mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan implentasi kurikulum yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Berpikir kritis ditandai dengan mahasiswa aktif dalam menganalisis dan menanggapi masalah-masalah yang ada disekitarnya atau lebih tepatnya aktif berdiskusi dalam proses pembelajaran dan juga mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan aktif dalam oraganisasi di dalam kampus maupun diluar kampus. **Anti korupsi** ditandai dengan para mahasiswa telah diajarkan tentang anti korupsi dan menganalisis kasus-kasus korupsi yang terjadi dimasyarakat maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal mahasiswa dengan tujuan bahwa menjaga integritas diri dalam bekerja supaya terhindar dari tindak pidana korupsi, serta diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi yang berkaitan dengan tugas yang diberikan. **Bertanggung jawab** ditandai ketika mahasiswa diberi tanggungjawab kepada mereka mengerjakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan hal ini seperti dalam proses pembelajaran dalam kelas mahasiswa bertanggung jawab menyelesaikan tugas tepat waktu. **Komitmen moral** ditandai dengan mahasiswa melaksanakan tata tertib yang berlaku, serta berkomitmen dalam berinteraksi dengan teman maupun dosen sesuai dengan etika moral yang berlaku, dan yang terakhir, Konsisten hal ini sangat



nampak dalam keseharian mahasiswa mulai pada proses pembelajaran dikelas mahasiswa konsisten menyelesaikan tugas yang diberikan sesuai dengan kontrak perkuliahan, konsisten datang tepat waktu.

Disiplin ditandai pada mahasiswa disiplin dalam proses pembelajaran. **Kepedulian** dapat dilihat dari aktivitas yang selalu dilakukan mahasiswa dalam proses perkuliahan, seperti; membuang sampah pada tempatnya, membantu temannya.

Sopan santun dalam proses pembelajaran mahasiswa menunjukkan sikap sopan dan santun kepada dosen maupun teman sebayanya dan bertutur kata sopan.

Percaya diri ditandai dengan mahasiswa yang menunjukkan percaya diri dalam proses pembelajaran mahasiswa banyak yang bertanya, menjawab, menanggapi materi pembelajaran. **Proaktif** ditandai mahasiswa mempersiapkan media pembelajaran yang berupa proyektor sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu ada juga mahasiswa yang mengambil absen mahasiswa sebelum diminta oleh dosen. Dengan demikian banyak mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI aktif dalam kegiatan mahasiswa didalam kampus maupun di luar kampus.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari temuan dan pembahasan hasil temuan penelitian, maka implementasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa prodi PPKn dapat dilihat dari beberapa

komponen pembelajaran yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan proses penilaian. Sebelum perencanaan pembelajaran di mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, terlebih dahulu perencanaan dalam penyusunan kurikulum yang dilaksanakan oleh Kepala program studi, dosen pengampu mata kuliah dengan melaksanakan seminar ataupun workshop dan juga rapat diskusi dalam membahas kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia lebih dalam dan malaraskan, menyesuaikan serta merelevansikan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI dengan kurikulum berbasis Kualifikasi Nasional Indonesia yang tidak terlepas dari misi dan visi kampus.

Perencanaan pembelajaran yang dikembangkan berupa kontrak perkuliahan mata kuliah di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) mahasiswa, maka dalam pelaksanaan pembelajaran dosen mengembangkan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup serta aktivitas-aktivitas lainnya dalam proses pembelajaran. Sedangkan proses penilaian, dosen mengembangkan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang berbasis sikap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa implementasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dapat meningkatkan



keterampilan kewarganegaraan mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Bhinneka PGRI Pendidikan Tenaga kependidikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

Bobbit, F. 1918. *The Curriculum*. Boston: Houghton Mifflin.

Cholisin. (2004). Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan, *Jurnal Civics*, 1(1), hlm. 14-18

Daulay, Haidar Putra, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.

Komalasari, K. dan Budimansyah, D (2008), *Pengaruh Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Kompetensi Kewarganegaraan Siswa SMP*. Bandung: ActaCivicus Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2 no.1

Kalidjernih, F.K. (2010). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.

Maiello, C, Oser, F., & Biedermann, H. (2003). *Civic Knowledge, Civic Skill and Civic Engagement*. European Education

Research Journal, 2(3), 384-395.
<http://doi.org/10.2304/eerj.2003.2.3.5>

Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Schubert, W.H. 1986. *Curriculum: Perspective, Paradigm, and Possibility*. New York: Macmillan Publishin Co.

Suryosubroto, B, Tatalaksana Kurikulum, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tim, 2014, Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. 2014. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

Wahab, A.A & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta

Winataputra, U.S. 2007. *Pendidikan demokrasi dalam konteks civic education di negara-negara berkembang*. *Jurnal Acta Civicus*, Vol. 1, hlm. 11-

